

DAFTAR ISI

35	13.3	Pembangunan Daerah Berbasis Keunggulan Lokal dan Potensi Masyarakat	85
35	13.4	Hambatan yang Dihadapi dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	87
38	13.5	Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90
BAB XIV		PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR PANTAL	95
41	14.1	Kondisi dan Karakteristik Wilayah Pesisir Pantai	95
41	14.2	Pendekatan Pembangunan Wilayah Pesisir	96
42	14.3	Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Partisipasi Rural Appraisal (PRA)	97
42	14.4	Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	99
43	14.5	Wilayah Pesisir dan Penjagaan Keamanan Maritim	100
BAB XV		PENDUDUK SUMBERDAYA LAUT DAN TRANSPORTASI MERUPAKAN	101
45	15.1	Unsur Fundamental Pengembangan Wilayah Pesisir	101
47	15.2	Kepijakan Transportasi Nasional	103
BAB VIII		JARINGAN TRANSPORTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM	104
KATA PENGANTAR			v
DAFTAR ISI			vii
BAB I		PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Pentingnya Pembangunan Ekonomi Maritim Dipelajari Sebagai Mata Kuliah Tersendiri	3
BAB II		PENGERTIAN, PERANAN, DAN FUNGSI PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM	5
	2.1	Pengertian Pembangunan Ekonomi Maritim	5
	2.2	Beberapa Terminologi dan Pendekatannya	6
	2.3	Peranan dan Fungsi Pembangunan Ekonomi Maritim	9
	2.4	Slogan "Ship Follows Trade" dan "Trade Follows Ship"	15
BAB III		WAWASAN NUSANTARA DAN KONSEP BENUA MARITIM (BMI)	17
	3.1	Konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State) dan Wawasan Nusantara	17
	3.2	Masalah Batas Laut	18
	3.3	Wawasan Nusantara dan Konsep Benua Maritim (BMI)	21
BAB IV		INDONESIA NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DAN MEMILIKI BANYAK PINTU	25
	4.1.	Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Terbesar di Dunia	25
	4.2.	Indonesia Negara Banyak Pintu	27
BAB V		KEUNGGULAN GEO STRATEGI, GEO EKONOMI, DAN GEO POLITIK	31
	5.1.	Keunggulan Geostrategi	31
	5.2.	Keunggulan Geoekonomi	32
	5.3	Keunggulan Geopolitik	33

BAB VI	MENGEMBANGKAN EKONOMI MARITIM	35
6.1	Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi	35
6.2	Ekonomi Maritim Sebagai Kecabangan Ilmu Ekonomi	38
BAB VII	SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS)	41
7.1	Definisi Landasan. dan Asas Sistranas	41
7.2	Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Sistranas	42
7.3	Moda Transportasi dan Jaringan Transportasi	42
7.4	Jaringan Transportasi	43
7.5	Trigatra Transportasi Nasional	44
7.6	Visi, Misi, dan Kebijakan Transportasi Nasional	45
7.7	Tatanan Transportasi	45
7.8	Kebijakan Transportasi Nasional yang Komprehensif	47
BAB VIII	JARINGAN TRANSPORTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM	51
8.1	Perairan/Laut Sebagai Arena Interaksi Pembangunan	51
8.2	Jaringan Pelayanan Transportasi Laut	52
8.3	Jaringan Prasarana Transportasi Laut	53
8.4	Penyusunan Trayek Transportasi Laut	55
BAB IX	PERANAN DAN FUNGSI PELABUHAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM	57
9.1	Pengertian dan Peranan Pelabuhan	57
9.2	Fungsi Pelabuhan dalam Pembangunan	58
BAB X	PENGEMBANGAN WILAYAH MARITIM	65
10.1	Unsur-unsur Fundamental Pengembangan Wilayah Maritim	65
10.2	Struktur Dasar Pengembangan Wilayah	67
BAB XI	SISTEM PERWILAYAHAN MARITIM	71
11.1	Klasifikasi Wilayah	71
11.2	Klasifikasi Wilayah Maritim lainnya	73
11.3	Menentukan Batas Wilayah Maritim (Laut)	74
BAB XII	PEMBANGUNAN INDONESIA BERBASIS KEMARITIMAN	77
12.1	Mengapa Pembangunan Berbasis Kemaritiman	77
12.2	Pembangunan Maritim Harus Diberikan Perhatian Lebih Besar	80
BAB XIII	PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KEPULAUAN	81
13.1	Indonesia adalah Negara Kepulauan Terbesar di Dunia	81
13.2	Kegiatan Pembangunan Antar Pulau	82

13.3	Pembangunan Daerah Berbasis Kepulauan	85
13.4	Hambatan yang Dihadapi dalam Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	87
13.5	Penataan Ruang Wilayah Pesisir	90
BAB XIV	PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR PANTAI	95
14.1	Kondisi dan Karakteristik Wilayah Maritim (Pesisir Pantai)	95
14.2	Pendekatan Pembangunan Bottom-Up	96
14.3	<i>Rapid Rural Appraisal</i> (RRA) dan <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA)	97
14.4	Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	99
14.5	Wilayah Pesisir dan Penjagaan Keamanan Maritim	100
BAB XV	PENDUDUK SUMBERDAYA ALAM, DAN TRANSPORTASI MERUPAKAN UNSUR FUNDAMENTAL PENGEMBANGAN WILAYAH	103
15.1	Unsur Fundamental dalam Pembangunan	103
15.2	Unsur Fundamental dalam Pengembangan Wilayah	104
15.3	Kebijakan Investasi dalam Pengembangan Wilayah	107
BAB XVI	MENGEMBANGKAN KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI ARCHIPELAGO	109
16.1	Mengapa Perlu Konsep Pembangunan Ekonomi Archipelago	109
16.2	Konsep dan Tujuan Konsep Pembangunan Ekonomi Archipelago	111
16.3	Strategi Pengembangan Wilayah Archipelago	112
16.4	Batasan Ekonomi Kepulauan, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Maritim, dan Ekonomi Archipelago	113
16.5	Munculnya Konsep Ekonomi Archipelago	114
BAB XVII	KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN "SEMEJA"	117
17.1	Deklarasi Juanda (1967) dan Prinsip Negara Kepulauan (1982)	117
17.2	Orientasi Pembangunan ke Arah Daratan dan ke Arah Laut	118
17.3	Konsep Pembangunan Kawasan "Semeja" (Satu Meja) dan Desentralisasi Ekonomi	120
17.4	Lingkungan Usaha dan Sasaran Pembangunan Kawasan "Semeja"	122
17.5	Pemanfaatan Jalur Pelayaran Selat Lombok Melewati Selat Makassar sebagai Life Line untuk menunjang Pembangunan Kawasan Semeja	125
17.6	Munculnya Konsep Pembangunan Kawasan SEMEJA	126
BAB XVIII	KABUPATEN MARITIM, STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KELAUTAN, DAN EQUAL DISTANCE PRINCIPLE	129
18.1	Kabupaten Maritim dan Forum dan Provinsi Kepulauan	129
18.2	Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan	130
18.3	<i>Equal Distance Principle</i> dalam Sistem Perwilayahan Laut	133

BAB XIX	STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN CEPAT TUMBUH	135
19.1	Permasalahan dan Tantangan	135
19.2	Strategi Kebijakan	136
19.3	Program Pembangunan	137
19.4	Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Berdasar Potensi Ekonomi dan Kemampuan Berkembang	138
BAB XX	POTENSI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA	141
20.1	Potensi Sektor Pesisir dan Kelautan	141
20.2	Ekonomi Kelautan dan Kebijakan Kelautan dalam Membangun Negara Maritim	143
20.3	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal	146
20.4	Ekonomi Maritim dan Kesejahteraan Ekonomi	147
BAB XXI	KONDISI DAN PROSPEK TRANSPORTASI MARITIM	149
21.1	Perkembangan Teknologi Transportasi Maritim	149
21.2	Lingkup Kegiatan Transportasi Maritim	150
21.3	Kondisi Eksisting dan Masa Depan Transportasi Maritim	153
BAB XXII	PENUTUP	155
	DAFTAR PUSTAKA	159
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	163
	PENGEMBANGAN KAWASAN "SEMESTA" *****	65
10.1	Unsur-unsur Pembangunan Kawasan "Semesta" (1982)	65
10.2	Struktur dan Organisasi Pembangunan Kawasan "Semesta" (1982)	67
	SISTEM PERWILAYAHAN	71
11.1	Lingkungan Usaha dan Sasaran Pembangunan Kawasan "Semesta" 1.1.1	71
11.2	Pemanfaatan Jalur Pelayaran Selat Melawai Selat Makassar 1.1.2	73
11.3	sebagai Life Line untuk menunjang pembangunan Kawasan "Semesta" 1.1.3	74
	PENGEMBANGAN KAWASAN "SEMESTA"	77
	KABUPATEN MARITIM STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN EQUAL DISTANCE PRINCIPLE	80
12.1	Kabupaten Maritim dan Forum dan Provinsi Kepulauan	81
12.2	Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan	81
13.1	Equal Distance Principle dalam Sistem Perwilayahan Laut	81
13.2	Kelembagaan Antar Pulau	82